



**RANCANGAN AWAL RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2025**

**Jl. Raya Padang Ratu Nomor 999 Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah, 34161**

Website : dpmptsp.lampungtengahkab.go.id

e-mail : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Padang Ratu No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161
Website : <http://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id>
Email : dpmpptsp.kablampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 900.1.3.7/ 021/ D.a. VI.17/I/ 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang: a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2024.;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
15. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
18. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

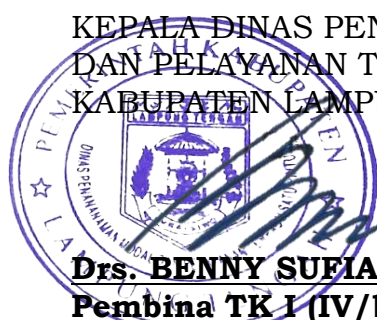
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA	:	Tim Penyusuaana Renja Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk: Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Renja Kerja (Renja) termasuk pengumpulan data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Data Renja, Melaksanakan proses perbaikan sesuai dengan petunjuk dari unsur Bappeda sampai Renja ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
KETIGA	:	Tim Penyusunan Renja dapat melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah.
KEEMPAT	:	Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebabnkan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Ditetapkandi : Gunung Sugih,
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



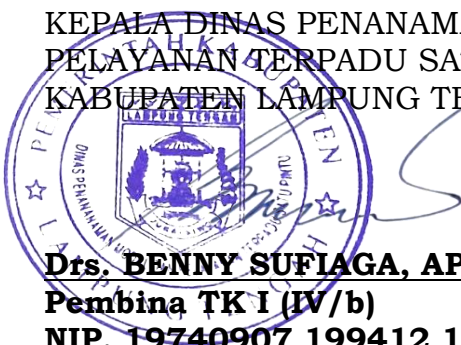
Drs. BENNY SUEIAGA, AP., M.H
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19740907 199412 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Lampung Tengah
Nomor: 021/D.a.VI.17/I/2024
Tanggal: 11 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENJA SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
Ketua	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
Sekretaris	: Perencana Ahli Muda Subkoordinator Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
Anggota	: 3 (tiga) orang unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19740907 199412 1 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161
Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>
Email : dpmpstp.kablampungtenengah@gmail.com

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 900.1.3.7/021.a / D.a.VI.17/I/ 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang: a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2024.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender kab. Lampung Tengah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
16. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

18. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;
KEDUA : Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
KETIGA : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Ditetapkandi : Gunung Sugih,
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19740907 199412 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H
Pembina TK I (IV/b)
NIP, 19740907 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	9
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra.....	16
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	22
2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPd.....	24
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	32
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	33
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	44
4.1 Prioritas Pembangunan	44
4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan	46
BAB V. PENUTUP	49
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	49
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	49
5.3 Rencana Tindaklanjut.....	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah sebagai satuan kerja perangkat daerah (OPD) pada tahun 2025 ini menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.155-137 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

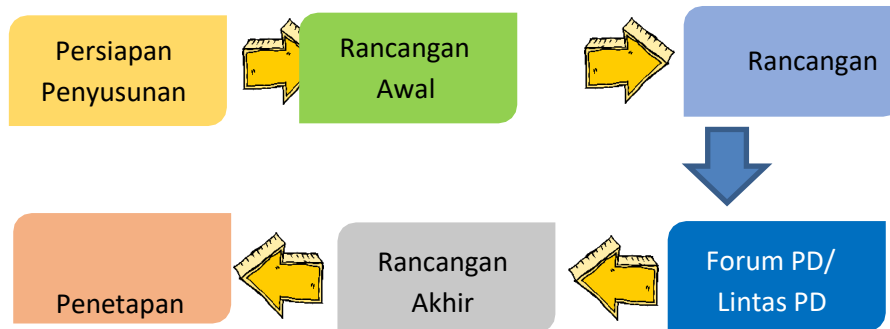
1.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2025, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah



Dari sisi proses, penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah.
 - b. Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024, dan rancangan RKPD tahun 2024).
2. Penyusunan rancangan awal
 - a. Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana.
 - b. Desk dengan pengampu kegiatan.
3. Rancangan
 - a. Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun DPMPTSP Lampung Tengah.
 - b. Masukan dari pelaksana kegiatan di DPMPTSP Kab. Lampung Tengah.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
 - a. Melaksanakan FGD dengan mengundang : Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - a. Penyempurnaan oleh Tim
 - b. Diverifikasi oleh Tim Penyusunan RKPD Provinsi Lampung
6. . Penetapan

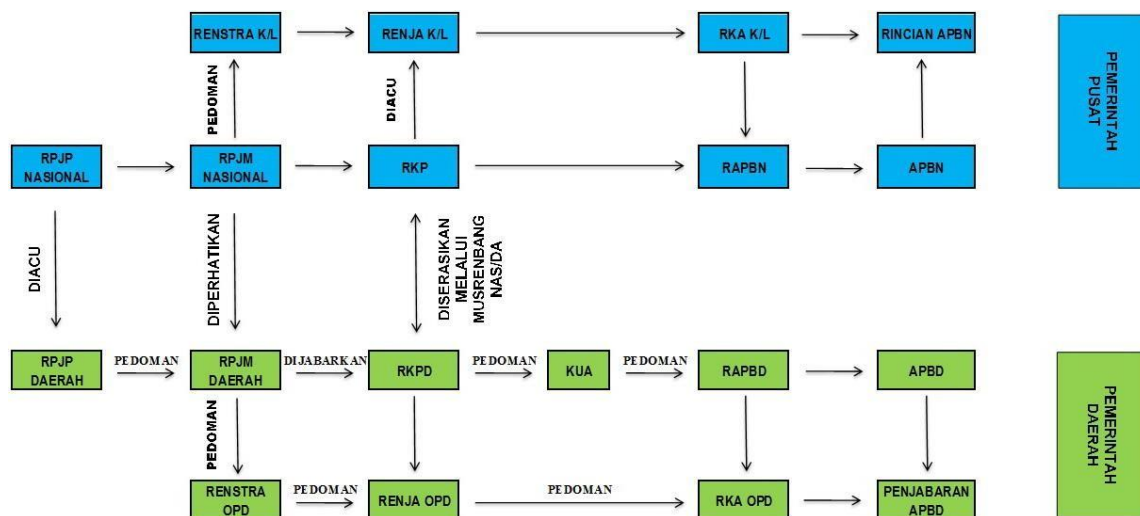
1.1.1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ruang lingkup Perencanaan

Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Lampung Tengah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.2.3 Ketentuan Tentang Perencanaan Penguasaan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender kab. Lampung Tengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun anggaran 2025, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan , lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah untuk mensinergikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2025 Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPMPTSP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen

RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. (Permendagri 86 tahun 2017, RPJMD Kab, Renstra PD, RKP, RKPD Kab)

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Capaian Renstra.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan . Dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan uraian memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2025 terkait kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaan memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1.155-317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 900.1.155-317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2,1 Evaluaai Pelakaanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.2 Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.155-317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai Nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota Ditahun 2023. DPMPTSP Kab. Lampung Tengah melaksanakan 3 Program dan 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.456.736.322,-

Ditahun 2023 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1. Meningkatkan Iklim Investasi Daerah, dengan target Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi dan 2, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan.

2.1.2 Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi yang dilakukan pada saat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah terdiri dari 3 Program dan 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.456.736.322,- merupakan bahan analisis terhadap usulan rancangan Renja Tahun ini. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

dengan anggaran sebesar Rp 2.228.951.500,- melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 0,- outcome kinerja yakni: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terpenuhi dengan target kinerja 4 Dokumen, dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 708.408.000,-outcome kinerja yakni: Persentase Temuan Laporan atas hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcom kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat, outcome kinerja kegiatan ini adalah Rp. 783.369.500,- Jumlah penyediaan Kebutuhan Layanan Umum PD dengan target kinerja 85%, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (5 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 5 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 460.350.000,- memiliki *outcome* yaitu: Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja 3 Jenis, dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Rp464.024.000, *outcome* kinerja yakni: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja 38 unit, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (4 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 4 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

2. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Dengan anggaran sebesar Rp 0,- Program ini tidak dilaksanakan disebabkan Permenkue RI 212/PMK.07/2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 0,-, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor yang dipenuhi dengan target kinerja (70%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);

3. **Program Promosi Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 100.000.000,-, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah Kegiatan Promosi PM yang Dilaksanakan dengan target kinerja 1 pameran, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 0 tidak dilaksanakan disebabkan Permenkue RI 212/PMK.07/2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 0,-, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP dengan target kinerja 40 Dokumen, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 365.200.000,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 365.200.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten dengan target kinerja (70%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah target).

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 0, Permenkue RI 212/PMK.07/2022,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 0, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi dengan target kinerja 6 dokumen.

Uraian anggaran DPMPSTSP kabupaten Lampung Tengah di atas merupakan gambaran secara umum, bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada seluruh sub kegiatan

disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.155-317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga perlu disusun perubahan perencanaan, target dan satuan target. Selain itu secara substansi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi semula 12 bulan menjadi 12 laporan. Anggaran sewa gedung di sub kegiatan tersebut berada dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Gambaran secara umum Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Lampung Tengah pada tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kab. Lampung Tengah.

2.1.3. Review Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Pada tahun 2023 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah telah melaksanakan 3 program, 6 kegiatan, dan 15 sub kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan pada PNS lingkup DPMPTSP Kab. Lampung Tengah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.762.584.822,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.577.232.403,- atau 93,29%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 melaksanakan Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.028.466.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.790.537.103 atau 92,14%.

Total Belanja Keseluruhan DPMPTSP adalah Rp. 5.550.496.083,- terealisasi sebesar Rp. 5.299.592.103,- atau 95,48%,

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2022 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah sebesar 100 %. Dengan capaian kinerja sebesar 94,76% tersebut DPMPTSP Kab. Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024 tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan usulan sebesar Rp 2.870.000.000,- terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 27 Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 90 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- 2) Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
- 3) Belum tersedianya rencana detil tata ruang yang telah memiliki aspek legal; RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Lampung Tengah 4 – 9
- 4) Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
- 5) Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
- 6) Promosi investasi yang belum optimal;
- 7) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- 8) Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan;

- 9) Belum optimalnya perencanaan terhadap potensi suatu daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun pihak Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan se Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No			Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja PD tahun (n-1)	Prakiraan Realisasi Capain Target Rentra PD s/d Tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)2025	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100 %
2.18.02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen		
2.18.02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen		

			Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal								
2.18.02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	kegiatan usaha	kegiatan usaha	kegiatan usaha	100	kegiatan usaha		-
2.18.02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	Perda/perkada	Perda/perkada	Perda/perkada	Perda/perkada	100	Perda/perkada		-
2.18.02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		-
2.18.02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		-
2.18.03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	94,89%
2.18.04	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	angka	angka	angka	angka	100	angka	angka	99,23%
2.18.05	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		

			Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Kabupaten								
2.18.06	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	99,23%
2.18.04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.18.04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	100	35 dokumen		
2.18.04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	100	2000 pelaku usaha		

[illegible]

2.18.05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	70%	70%	70%	100	70%	70%	95,69%
2.18.05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	100	40 kegiatan usaha		
				Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100			
2.18.05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang		
				Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	980 orang	980 orang	980 orang	980 orang	100	980 orang	980 orang	94,34%
2.18.05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	100	25 kegiatan usaha		

[illegible]

				undangan yang berlaku								
2.18.01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen		
2.18.01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen		
2.18.01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan		
2.18.01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	97,47%
2.18.01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100	55 orang/bulan	55 orang/bulan	93,50%
2.18.01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	100	31 dokumen	31 dokumen	97,47%

2.18.01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan		-
2.18.01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen		-
2.18.01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	46 paket	46 paket	46 paket	100	46 paket		-
2.18.01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100	8 orang		-
2.18.01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	0.85	85%	85%	85%	100	85%	85%	99,08%
2.18.01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	98,56%
2.18.01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	99,61%

2.18.01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	99,24%
2.18.01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100%
2.18.01	2,06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100	24 laporan	24 laporan	100%
2.18.01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit	unit	unit	unit	100	unit		-
2.18.01	2,08		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit		-
2.18.01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	76,31%
2.18.01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	76,31%
2.18.01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	53 unit	53 unit	53 unit	53 unit	100	53 unit	53 unit	98,67%

2.18.01	2,09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	99,96%
2.18.01	2,09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	12	97,46%
2.18.01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	47 unit	47 unit	47 unit	47 unit	100	47 unit	47 unit	98,96%
2.18.01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	97,91%

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebaga berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Iklim Investasi

Indikator Kinerja Utama

1. Nilai Realisasi Investasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023, Target realisasi investasi di tahun 2022 adalah 10% capaian realisasi sebesar Rp 25.944.131.542.055 atau sebesar 82% melebihi target. Untuk target realisasi investasi di tahun 2023 adalah 10% dengan capaian realisasi sebesar 30.362.319.958.982 atau sebesar 17%. Jika dibandingkan capaian realisasi investasi antara tahun 2021 dan 2022 maka ada kenaikan capaian, akan tetapi pencapaian realisasi investasi di Renja tahun 2022 tetap melebihi target.

Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi **PMA** yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah.

Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada di daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan Target IKM di

tahun 2023 dengan nilai 88 dengan capaian realisasi dengan nilai 90,75%

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Target Persentase Perangkat Daerah dengan skor AKIP minimal "BB" di tahun 2023 ditetapkan 10% dengan capaian A.

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP

No	Indikator	S P M	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Anali sis
				2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SASARAN UTAMA												
1	Nilai Realisasi Investasi	- -	Persentase Peningkatan Investasi	8,7	10	10	10	25.944.	30.362.	10	10	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan			72,25	86,72	88,81	89,47	88	90,75	88,81	90,75 %	
SASARAN PENDUKUNG												
1	Persentase Perangkat Daerah dengan skor AKIP minimal "BB"	- -	Nilai AKIP DPMPTSP	B	B	BB	BB	BB	A	B B	A	

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kab. Lampung Tengah yang

membantu Bupati Lampung Tengah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kab. Lampung Tengah mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kab. Lampung Tengah dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja SDM di DPMPTSP;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;

Dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Gender yang termasuk dalam Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta dengan rician Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Indikator Kinerjanya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan biaya sebesar Rp. 51.950.900,- Satuannya 2000 Pelaku Usaha .

Tabel 2.2.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Gender Tahun 2024

No	Uraian	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1.	Pelaku Usaha	90	10

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pelaku usaha berbasis gender, dimana pelaku usaha laki-laki masih mendominasi. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis agar mendorong pelaku usaha perempuan untuk tumbuh dan berkembang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yang masuk kategori "Berhasil" yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di Tahun 2023 mencapai Rp 30.362.319.958.982 atau melebihi
- Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di Tahun 2023 mencapai 26.449 Izin atau melebihi target
- Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP, di Tahun 2023 mencapai 11,74% dari target yang ditetapkan izin yang diterbitkan sesuai waktu SOP.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Kondisi Permendagri dari , Permenkue RI 212/PMK.07/2022 sehingga tidak memungkinkan melaksanakan Program/kegiatan urusan penanaman modal seperti Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/ pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- d. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- e. Dalam proses pengefektifan izin dengan komitmen masih yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;
- f. Adanya ketidaksesuaian data scan yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan setara antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (strenghts) dan berupa kelemahan (weaknesses).

1. Kekuatan (Strengths)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan FTSP;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (Opportunities) dan ada yang berupa ancaman (Threats). Faktor eksternal yang menjadi peluang (Opportunities) adalah sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (opportunities) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara professional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis ~~te~~informasi melalui aplikasi OSS RBA (Risk Based Approach);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah yang mampu menyerap tenaga kerja;
- f. Penyediaan data potensi dan peluang investasi Yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- g. Tersedianya tempat dan event pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kabupaten Lampung Tengah.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal Yang menjadi Anca_man (threats) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;

- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPPK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Yang dilaksanakan oleh Dinas;
2. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
4. Inovasi layanan Yang mendukung dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (Risk Based Approach);
5. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
6. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM ;
7. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha Yang terdapat pada sistem OSS;
8. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPSTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
9. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari;
2. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPPSP Kabupaten Lampung Tengah dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko Yang diselenggarakan Oleh BKPM;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja adalah perencanaan tahunan Dinas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Agar tujuan dan sasaran Dinas tercapai sesuai dengan target kinerja Yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan koreksi, jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan. Dalam rancangan awal RKPD 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah mengusulkan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.910.904.216,-, namun dengan adanya perubahan pada penjabaran III dan penjabaran IV terkait adanya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor. 906/923/ Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada program Pelayanan Penanaman Modal penambahan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tidak mengubah anggaran, hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi, masyarakat dan perguruan tinggi.

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL										
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Realisasi Investasi	70%	96,157,400	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Realisasi Investasi	70%	96,157,400	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 perda	20,800,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 perda	20,800,000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 perda	20,800,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 perda	20,800,000	

	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	2 Dok	75,357,400	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	2 Dok	75,357,400	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 Dok		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 Dok		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 Dok	75,357,400	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 Dok	75,357,400	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10%	415,606,500	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10%	415,606,500	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Dok		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Dok		

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	2 Dok	415,606,500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	2 Dok	415,606,500	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	100%	67,123,500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	100%	67,123,500	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 Dok	67,123,500	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 Dok	67,123,500	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	51,950,900	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	51,950,900	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman			

		Gunung Sugih	Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha				Gunung Sugih	Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha			
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 org	15,172,600	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 org	15,172,600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	70%	670,341,600	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	70%	670,341,600	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	670,341,600	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	670,341,600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Keg Usaha	30,150,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Keg Usaha	30,150,000	

	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Keg Usaha		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Keg Usaha		
			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	20 Dok	89,154,000			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	20 Dok	89,154,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 pelaku usaha	42,829,900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 pelaku usaha	42,829,900	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 pelaku usaha		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 pelaku usaha		
		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	620 orang	440,438,000		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	620 orang	440,438,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 Keg usaha	17,269,700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 Keg usaha	17,269,700	

	Pengawasan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pemantauan serta Rekomendasi hasil pengawasan	25 Keg usaha		Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pemantauan serta Rekomendasi hasil pengawasan	25 Keg usaha		
		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 Dok	50,500,000		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 Dok	50,500,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	75%	74,773,900	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	0.75	74,773,900	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 Dok	74,773,900	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 Dok	74,773,900	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dok	74,773,900	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dok	74,773,900	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	4 Dok	2,204,951,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	4 Dok	2,204,951,200	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dok	6,845,500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dok	6,845,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	6,845,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	6,845,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	529,075,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	529,075,000	

	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bln	3,382,038,116	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bln	3,382,038,116	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	31 Dok	521,208,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	31 Dok	521,208,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semes teran SKPD	6 Laporan	7,867,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semes teran SKPD	6 Laporan	7,867,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	100%	40,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	100%	40,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	40,000,000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	85 %	565,520,700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	85 %	565,520,700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	207,250,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	207,250,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	54,731,200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	54,731,200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	48,532,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	48,532,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	76,625,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	76,625,000	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	178,382,000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	178,382,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	609,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	609,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	609,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	609,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	53 unit	453,910,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	53 unit	453,910,000	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41,670,000	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41,670,000	

	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	118,100,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	118,100,000		
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	175,370,000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	175,370,000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	118,770,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	118,770,000		
JUMLAH					3,528,954,100	JUMLAH					3,528,954,100	

Tabel T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/Volum e	Catatan
1	2	4	3	8	
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Realisasi Investasi	70%	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 perda	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 perda	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	2 Dok	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 Dok	

	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 Dok	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Dok	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	2 Dok	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	100%	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 Dok	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha		

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 org	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota		
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	70%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Keg Usaha	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Keg Usaha	
			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	20 Dok	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 pelaku usaha	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 pelaku usaha	

		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	620 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 Keg usaha	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pemantauan serta Rekomendasi hasil pengawasan	25 Keg usaha	
		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 Dok	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	75%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 Dok	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dok	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	4 Dok	

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dok	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bln	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	31 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 orang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	85 %	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	53 unit	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah periode 2021- 2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif agar pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat mencapai target tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Akhir (Ranhir) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni "Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah berjaya" yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi dan DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Misi 3 dan misi ke 5 yaitu

" Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan "

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu **Meningkatnya Nilai Investasi.**

KEBIJAKAN - KEBIJAKAN

a. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk memberikan landasan utama sebagai persiapan keluar dari middle Income Trap (MIT) dan memasuki era sebagai daerah yang maju berpendapatan tinggi pada tahun 2025.
2. Perekonomian daerah harus tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui penguatan

sektor primer dengan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai keunggulan wilayah, dan modernisasi sektor jasa didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai dan handal.

3. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UMKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif (decent jobs), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (financial Inclusion).
4. Ketahanan Ekonomi dibangun dengan terus menjaga stabilitas makro dengan terus membangun ketahanan pangan dan energi.

b. Kebijakan Kewilayahan

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi, teknologi dan Lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW. Kawasan Strategis wilayah Kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
2. Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) wilayah administrasi pemerintahan, yaitu : Wilayah administrasi Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan dua daerah persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat.

c. Kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah.

Delapan Kawasan strategis dalam RTRW Lampung Tengah tahun 2011-2031 yang dapat menjadi prioritas pusat-pusat pengembangan wilayah Lampung Tengah untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. **Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) TERBAGUS** (Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih). TERBAGUS berpotensi untuk senantiasa berkembang dimasa mendatang.
2. **Kawasan Pendidikan Terpadu** berbasis potensi lokal diSulusuban. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi salah satu Technopark di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat untuk membangun 100 Technopark di Kabupaten/kota Indonesia dan salah satunya di Lampung Tengah.
3. **Kawasan Industri di alur Lintas Timur** dengan lokasi diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, Way Seputih dan Bandar Mataram. Daerah ini akan berkembang cepat pada masa mendatang akibat bertambahnya umlah penduduk dan kendaraan angkutan barang/orang yang melintas maka secara fungsi jalur timur bukan hanya melayani beberapa kota dibagian timur Pulau Sumatera, tetapi juga menjadi Lintas Perdagangan anatar negara Asean (trans asean).

4. **Kawasan Niaga Terpadu** yang berada di Kecamatan Terbanggi Besar (Kota Bandar Jaya). Komiditi yang diperdagangkan adalah hasil dari pertanian baik itu berupa bahan baku, bahan setengah adi maupun barang olahan/sudah siap pakai maupun barang dan jasa lainnya. Dengan adanya lintas tengah melalui kawasan niaga terpadu akan memberikan dampak yang sangat besar dengan adanya kemudahan akses untuk masuk dan keluar dari kawasan ini.
5. **Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)** PKLP dimasukkan dalam kawasan strategis kabupaten agar penataan ruang kawasannya, dapat diprioritaskan, sehingga kawasan ini dalam 5 (lima) tahun kedepan menjadi pusat Kegiatan Lokal, PKLP antara lain Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu, PKL di Kecamatan Seputih Banyak dan Kalirejo yang berpotensi mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. **Kawasan Hutang Lidung** yang berada di Register 39 (Kota Agung Utara) dan register 22 (Way Waya). Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat melalui permen PU nomor 16 tahun 2009 untuk dapat menyediakan ruang bagi paru-arua udara sebesar 30% dari Luas Kabuapten/Kota. Salah satu bentuknya adalah berupa keberadaan hutan. Mengandalkan program pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam perbaikan lingkungan hutan (Rehabilitasi) sangat kecil keberhasilannya dalam menjaga melestarikan keberadaan hutan. Penetapan kawasan hutan lindung pada register 39 yang berada dalam wilayah Kecamatan selagai Lingga seluas 3.228,79 Ha. Diharapkan tidak akan adanya perambahan dan pengalih fungsi kawasan ini pada masa mendatang.

d. Kebijakan Wilayah Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah

Kebijakan perwilayahan lainnya adalah berdasarkan isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada tahun 2017/2018 akan ada 2 wilayah daerah persiapan sebagai pemekaran Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Wilayah Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur telah memiliki beberapa kawasan pengembangan yaitu : Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Seputih Banyak, Kawasan Minapolitan di Bandar Surabaya dan pembangunan Dermaga Cabang di Kecamatan Seputih Surabaya. Penggunaan lahan DOB Kabupaten seputih Timur didominasi perkebunan yang dapat mendukung pengembangan industri pengolahan di sepanjang Jalan Lintas Timur.
2. Wilayah Daerah Persiapan Seputih Barat telah direncanakan pembangunan kawasan Technopark di Sulusuban Kampung Anak Tuha, Pengembangan kawasan Minapolitan di Kalirejo, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di barat di Padang Ratu.

Kabupaten Lampung Tengah induk yang terletak dibagian tengah akan mengalami perkembangan yang pesat menjadi *urbanized* atau kawasan perkotaan, karena :

1. Pembangunan jalan toll ruas Tegineneng-Terbanggi Besar berdampak pada perubahan penggunaan lahan di desa-desa yang dilalui jalan toll dengan 2 pintu toll di Desa Trimurjo dan Desa Terbanggi Besar.
2. Perkembangan kawasan TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar aya dan Gunung Sugih) disepanjang jalan lintas Tengah yang berbentuk linier atau pita akan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti; kemacetan, kawasan kumuh dan persolan lingkungan terutama persampahan dan sanitasi. Pada kawasan ini telah dibangun Jalan Lingkar BandarJaya Bagian Barat dan direncanakan akan dibangun Lingkar Timur untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dilintas tengah.
3. Kawasan Niaga Terpadu di Terbanggi Besar sebagai pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bangunan terminal yang dibangun di Kawasan ini masih terbengkalai dapat direvitalisasi untuk mendukung Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan.
4. Kampung Kota Gajah telah ditetapkan sebagai kawasan metropolitan dan penyusunan DED tahun ini sudah selesai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu " Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan terpadu " dan " Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Akuntabel dan Profesional serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas melalui tujuan yaitu :

- Meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Lampung Tengah dan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perizinan

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah adalah "Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan" melalui:

- a. Realisasi Investasi;
- b. Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Faktor•faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Visi " ***Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya***". Guna mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PD

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL								
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	70 persen	96,157,400	APBD		70 persen	96,157,400
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 dokumen	20,800,000	APBD		3 dokumen	20,800,000
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 dokumen	20,800,000	APBD		3 dokumen	20,800,000
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan		kegiatan usaha	-			kegiatan usaha	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Perda/perkad a	75,357,400	APBD		Perda/perkad a	75,357,400
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen	75,357,400	APBD		1 dokumen	75,357,400
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	10 persen	415,606,500	APBD		10 persen	415,606,500
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	angka	415,606,500	APBD		angka	415,606,500
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen	415,606,500	APBD		1 dokumen	415,606,500

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	100%	67,123,500	APBD		100%	67,123,500
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	35 dokumen	67,123,500	APBD		35 dokumen	67,123,500
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	2000 pelaku usaha	51,950,900	APBD		2000 pelaku usaha	51,950,900
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Kegiatan usaha				Kegiatan usaha	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	12 orang	15,172,600	APBD		12 orang	15,172,600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Kegiatan usaha				Kegiatan usaha	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	70%	670,341,700	APBD/ APBN		70%	670,341,700
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Kewenangan Daerah Menjadi Kabupaten/Kota	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	70%	670,341,700	APBD		70%	670,341,700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	40 kegiatan usaha		APBD		40 kegiatan usaha	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	40 kegiatan usaha	30,150,100			40 kegiatan usaha	30,150,100
		Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	20 dokumen	89,154,000			20 dokumen	89,154,000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	150 orang		APBD		150 orang	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	150 orang	42,829,900			150 orang	42,829,900
			Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	980 orang	440,438,000	APBN		980 orang	440,438,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	25 kegiatan usaha		APBD		25 kegiatan usaha	
	Pengawasan Penanaman Modal		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	25 kegiatan usaha	17,269,700			25 kegiatan usaha	17,269,700
			Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	40 dokumen	50,500,000	APBN		40 dokumen	50,500,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	75%	74,773,900	APBD		75%	74,773,900
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	6 Dok	74,773,900	APBD		6 Dok	74,773,900
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	6 Dok	74,773,900	APBD		6 Dok	74,773,900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	100 persen	2,168,191,200	APBD		100 persen	2,168,191,200
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	4 dokumen	6,845,500	APBD		4 dokumen	6,845,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	4 Dokumen	6,845,500	APBD		4 Dokumen	6,845,500

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 laporan				6 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	100%	529,075,000	APBD		100%	529,075,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	55 orang/bln	3,382,038,116	APBD		55 orang/bln	3,382,038,116
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	31 Dok	521,208,000	APBD		31 Dok	521,208,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semeste	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 Laporan	7,867,000	APBD		6 Laporan	7,867,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	100%	40,000,000	APBD		100%	40,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih			APBD			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	8 orang	40,000,000	APBD		8 orang	40,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	85 %	565,520,700	APBD		85 %	565,520,700
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	2 Paket	207,250,000	APBD		2 Paket	207,250,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Jumlah Paket Peralatan Ruma	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 Paket	54,731,200	APBD		1 Paket	54,731,200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik y	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 Paket	48,532,500	APBD		1 Paket	48,532,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	2 Paket	76,625,000	APBD		2 Paket	76,625,000

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	24 Laporan	178,382,000	APBD		24 Laporan	178,382,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	unit		APBD		unit	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	unit		APBD		unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 jenis	609,600,000	APBD		3 jenis	609,600,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	12 Laporan	609,600,000	APBD		12 Laporan	609,600,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	53 unit	417,150,000	APBD		53 unit	417,150,000
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 unit	41,670,000	APBD		1 unit	41,670,000
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	4 unit	81,340,000	APBD		4 unit	81,340,000
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 unit	175,370,000	APBD		6 unit	175,370,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 unit	118,770,000	APBD		1 unit	118,770,000
JUMLAH					3,492,194,200		3,492,194,200		

BAB IV.

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun -5 2026					
						target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																
Meningkatkan Iklim Investasi Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi daerah	2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	130,158,200	70%	46,295,800	70%	-	70%	96,157,400	70%	96,157,400	70%	96,157,400	70%	108,695,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02 2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi	20,800,000	3 perda	46,295,800	3 perda		3 perda	20,800,000	5 perda	20,800,000	5 perda	20,800,000	15 perda	108,695,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor															
		2.18.02 2,01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	20,800,000	3 perda	46,295,800	3 perda		3 perda	20,800,000	3 perda	20,800,000	3 perda	20,800,000	15 perda	108,695,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02 2,01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah														DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02 2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	109,358,200	2 Dok		2 Dok		2 Dok	75,357,400	2 Dok	75,357,400	2 Dok	75,357,400	10 Dok	226,072,200	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02 2,02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	35,000,000	dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		4 Dok		DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02 2,02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	74,358,200	dok		1 Dok		1 Dok	75,357,400	1 Dok	75,357,400	1 Dok	75,357,400	4 Dok	226,072,200	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	136,705,200	10%	113,981,200	10%	100,000,000	10%	415,606,500	10%	415,606,500	10%	155,496,500	10%	1,200,690,700	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04 2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	136,705,200	2 pameran	113,981,200	2 pameran	100,000,000	2 pameran	415,606,500	2 pameran	415,606,500	2 pameran	155,496,500	10 pameran	1,200,690,700	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05 2,01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	23,381,400	1 Dok	38,387,600	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		5 dok	38,387,600	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06 2,01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	113,323,800	1 Dok	75,593,600	2 Dok	100,000,000	2 Dok	415,606,500	2 Dok	415,606,500	2 Dok	155,496,500	10 Dok	1,162,303,100	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur	134,145,050	100%	180,157,400	100%	-	100%	67,123,500	100%	67,123,500	100%	67,123,500	100%	381,527,900	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2.18.04 2,01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	134,145,050	35 Dok	180,157,400	35 Dok	-	35 Dok	67,123,500	35 Dok	67,123,500	35 Dok	67,123,500	175 dok	381,527,900	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04 2,01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	114,145,050	2000 pelaku usaha	156,950,900	2000 pelaku usaha		2000 pelaku usaha	51,950,900	2000 pelaku usaha	51,950,900	2000 pelaku usaha	51,950,900	100.000 Pelaku usaha	312,803,600	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04 2,01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal														DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

				Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha															
		2.18.04 2,01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	20,000,000	12 org	23,206,500	12 org		12 org	15,172,600	12 org	15,172,600	12 org	15,172,600	60 org	68,724,300	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04 2,01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota														DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatkan Iklim Investasi Daerah	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	402,761,950	70%	598,118,300	70%	365,200,000	70%	670,341,600	70%	670,341,600	70%	455,449,600	70%	2,759,451,100	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05 2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	402,761,950	70%	598,118,300	70%	365,200,000	70%	670,341,600	70%	670,341,600	70%	455,449,600	1	2,759,451,100	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Kabupaten/Kota																
		2.18.05 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		40 Keg Usaha		40 Keg Usaha		40 Keg Usaha	30,150,000	40 Keg Usaha	30,150,000	40 Keg Usaha	30,150,000	200 Keg usaha	90,450,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		40 Kegiatan Usaha												DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun	35,250,000	20 Dok	18,000,000	20 Dok		20 Dok	89,154,000	20 Dok	89,154,000	20 Dok		100 Dok	196,308,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	42,829,900	1400 pelaku usaha	196,934,600	150 pelaku usaha		150 pelaku usaha	42,829,900	150 pelaku usaha	42,829,900	150 pelaku usaha	42,829,900	750 pelaku usaha	325,424,300	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi		150 pelaku usaha												DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

				Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko															SATU PINTU
				Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	250,972,000	980 orang	347,914,000	980 orang	337,900,000	620 orang	440,438,000	980 orang	440,438,000	980 orang	337,900,000	4900 orang	1,904,590,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05 2,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	33,810,050	25 Keg usaha	17,269,700	25 Keg usaha		25 Keg usaha	17,269,700	25 Keg usaha	17,269,700	25 Keg usaha	17,269,700	125 keg usaha	69,078,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pembinaan dan pemantauan serta Rekomendasi hasil pengawasan		25 Keg usaha												DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	39,900,000	40 Dok	18,000,000	40 Dok	27,300,000	40 Dok	50,500,000	40 Dok	50,500,000	40 Dok	27,300,000	200 dok	173,600,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase pemenuhan permintaan data	203,837,500	75%	163,408,900	75%	-	75%	74,773,900	75%	74,773,900	75%	143,878,900	75%	456,835,600	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

	an daerah		PENANAMAN MODAL	dan informasi penanaman modal															SATU PINTU
		2.18.06 2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	203,837,500	6 Dok	163,408,900	6 Dok	-	6 Dok	74,773,900	6 Dok	74,773,900	6 Dok	143,878,900	30 dok	456,835,600	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06 2,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	203,837,500	6 Dok	163,408,900	6 Dok		6 Dok	74,773,900	6 Dok	74,773,900	6 Dok	143,878,900	30 dok	456,835,600	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan an daerah	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1,018,465,700	100%	1,926,505,100	100%	2,228,951,500	100%	2,168,191,200	100%	2,204,861,200	100%	2,343,621,200	100%	10,872,130,200	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2.18.01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4,414,400	4 Dok	17,608,300		-	4 Dok	6,845,500	4 Dok	6,845,500	4 Dok	6,845,500	20 dok	38,144,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4,414,400	4 Dok	13,577,500			4 Dok	6,845,500	4 Dok	6,845,500	4 Dok	6,845,500	16 dok	34,114,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	4,030,800									6 laporan	4,030,800	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	460,633,600	100%	486,792,000	100%	521,208,000	100%	529,075,000	100%	529,075,000	100%	716,275,000	100%	2,782,425,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,830,586,013	44 orang/bln	2,522,029,383	55 orang/bln	2,762,584,822	55 orang/bln	3,382,038,116	55 orang/bln	3,382,038,116	55 orang/bln	2,669,742,376	264 orang/bulan	14,718,432,813	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2.18.01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	457,040,000	31 Dok	486,792,000	31 Dok	521,208,000	31 Dok	521,208,000	31 Dok	521,208,000	31 Dok	708,408,000	155 dok	2,758,824,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3,593,600					6 Laporan	7,867,000	6 Laporan	7,867,000	6 Laporan	7,867,000	18 laporan	23,601,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	0	100%	0	100%	0	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	120,000,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan						8 orang	40,000,000	8 orang	40,000,000	8 orang	40,000,000	24 orang	120,000,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan	276,537,700	85 %	858,869,800	85 %	783,369,500	85 %	565,520,700	85 %	565,520,700	85 %	565,520,700	85%	3,338,801,400	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

				kantor yang disediakan															TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	83,000,000	2 Paket	403,000,000	2 Paket	375,000,000	2 Paket	207,250,000	2 Paket	207,250,000	2 Paket	207,250,000	10 paket	1,399,750,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30,000,800	1 Paket	43,300,300	1 Paket	74,934,000	1 Paket	54,731,200	1 Paket	54,731,200	1 Paket	54,731,200	5 paket	282,427,900	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42,762,900	1 Paket	45,260,400	1 Paket	48,881,500	1 Paket	48,532,500	1 Paket	48,532,500	1 Paket	48,532,500	5 paket	239,739,400	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,773,000	2 Paket	71,060,100	2 Paket	106,172,000	2 Paket	76,625,000	2 Paket	76,625,000	2 Paket	76,625,000	10 paket	407,107,100	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,06 09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	71,001,000	24 Laporan	296,249,000	24 Laporan	178,382,000	24 Laporan	178,382,000	24 Laporan	178,382,000	24 Laporan	178,382,000	120 laporan	1,009,777,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan		unit		unit		unit		unit		unit				DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

			Daerah																
		2.18.01 2,08	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan yang disediakan		unit		unit		unit		unit		unit				DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	116,780,000	3 jenis	181,055,000	3 jenis	460,350,000	3 jenis	609,600,000	3 jenis	609,600,000	3 jenis	609,600,000	15 jenis	2,470,205,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	116,780,000	12 Laporan	181,055,000	12 Laporan	460,350,000	12 Laporan	609,600,000	12 Laporan	609,600,000	12 Laporan	609,600,000	60 laporan	2,470,205,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	160,100,000	53 unit	382,180,000	53 unit	464,024,000	53 unit	417,150,000	53 unit	453,820,000	53 unit	405,380,000	265 unit	2,122,554,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41,670,000	1 unit	41,670,000	1 unit	41,670,000	1 unit	41,670,000	1 unit	41,670,000	1 unit	41,670,000	5 unit	208,350,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		2.18.01 2,09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81,340,000	4 unit	81,040,000	4 unit	81,340,000	4 unit	81,340,000	5 unit	118,010,000	4 unit	81,340,000	20 unit	443,070,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	68 unit	152,470,000	48 unit	290,510,000	6 unit	175,370,000	6 unit	175,370,000	6 unit	175,370,000	30 unit	969,090,000	68 unit	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi		1 unit	107,000,000	1 unit	50,504,000	1 unit	118,770,000	1 unit	118,770,000	1 unit	107,000,000	5 unit	502,044,000	DPMPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun dokumen perencanaan dan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di DPMPTSP yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di DPMPTSP, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu program maupun antar program.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten, dan Renstra OPD);

- b. Renja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak lanjut

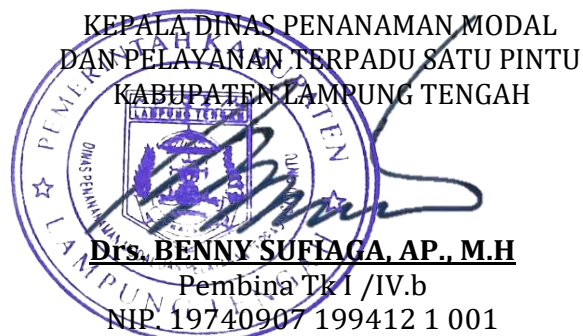
Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024, rencana tindak lanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain :

- a. Dalam rangka menjaga kesimbangan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b. Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas DPMPTSP Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSP Kab. Lampung Tengah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kab. Lampung Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Ditetapkandi Gunung Sugih,
Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H
Pembina Tk I /IV.b
NIP. 19740907 199412 1 001

LAMPIRAN

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
(Formulir E.29 Permendagri 86 Tahun 2017)**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah	V			
2.	Pengolahan data dan informasi	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			

10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	V			
------	--	---	--	--	--

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindakan lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan	V			

Gunung Sugih, 11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H
Pembina Tk I /IV.b
NIP. 19740907 199412 1 001